

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara luas yang tidak hanya berpusat di Ibu Kota semata, melainkan pergerakan perekonomian maupun pengembangan sebagai bentuk perwujudan pencapaian cita-cita Negara juga berlangsung pada tingkat Desa. Seperti yang kita ketahui sebagian besar penduduk di Indonesia hidup di Daerah pedesaan, sehingga titik sentral pembangunan adalah daerah di kawasan Desa. Keberadaan Desa juga menentukan keberhasilan pemerintah dalam hal pembangunan baik itu dari tingkat daerah maupun pusat, sehingga dalam hal ini kemajuan suatu Desa sangat menentukan kemajuan suatu Negara.

Optimalisasi pembangunan sangat dipengaruhi oleh bagaimana fungsi yang dijalankan oleh pihak pemerintah sebagai koordinator pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini pemerintah harus mampu mengkoordinasikan berbagai unit dalam pemerintahan agar dapat mendayagunakan fungsi mereka dengan baik dan memberikan kontribusi yang nyata bagi proses pembangunan. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, pemerintah memberikan perhatian yang sebesar-besarnya pada pembangunan di pedesaan. Perhatian yang besar terhadap pedesaan itu didasarkan pada kenyataan bahwa desa merupakan tempat berdiamnya sebagian besar rakyat Indonesia. Kedudukan desa dan masyarakat desa merupakan dasar landasan kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

Pemerintahan desa sebagai pemerintahan yang terendah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, maka kedudukan desa dalam pelaksanaan pembangunan mempunyai arti yang sangat penting. Desa sebagai unit pemerintahan yang terendah merupakan sasaran program-

program dari hampir semua instansi pemerintah. Kegagalan program di tingkat desa akan membawa dampak bagi kegagalan program pemerintah di atasnya juga.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Desa juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dalam hal peningkatan kesejahteraan, pemerintah melakukan upaya dengan membuat suatu kebijakan yang mengarah pada pemberdayaan.

Saat ini di Indonesia terdapat 38 provinsi, 514 kota/kabupaten, 7.277 kecamatan/distrik, 83.763 desa kelurahan dan 17.001 pulau sudah mempunyai nama. Di Provinsi Sumatera Utara jumlah desa/kelurahan menurut Kabupaten/Kota, 2017-2021.

(Sumber : Kepmendagri RI No. 100.1.1-6117 Tahun 2022 dan Permendagri RI No. 58 Tahun 202)

Tabel 1.1
Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara 2017 – 2021

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten					
01 Nias	170	170	170	170	170
02 Mandailing Natal	407	407	407	407	407
03 Tapanuli Selatan	248	248	248	248	248
04 Tapanuli Tengah	215	215	215	215	215

05	Tapanuli Utara	252	252	252	252	252
06	Toba	244	244	244	244	244
07	Labuhanbatu	98	98	98	98	98
08	Asahan	204	204	204	204	204
09	Simalungun	413	413	413	413	413
10	Dairi	169	169	169	169	169
11	Karo	269	269	269	269	269
12	Deli Serdang	394	394	394	394	394
13	Langkat	277	277	277	277	277
14	Nias Selatan	461	461	461	461	461
15	Humbang Hasundutan	154	154	154	154	154
16	Pakpak Bharat	52	52	52	52	52
17	Samosir	134	134	134	134	134
18	Serdang Bedagai	243	243	243	243	243
19	Batu Bara	151	151	151	151	151
20	Padang Lawas Utara	388	388	388	388	388
21	Padang Lawas	304	304	304	304	304
22	Labuhanbatu Selatan	54	77	73	73	73
23	Labuhanbatu Utara	90	90	90	90	90
24	Nias Utara	113	113	113	113	113
25	Nias Barat	105	105	105	105	105
Kota						
71	Sibolga	17	17	17	17	17
72	Tanjungbalai	31	31	31	31	31
73	Pematangsiantar	53	53	53	53	53
74	Tebing Tinggi	35	35	35	35	35
75	Medan	151	151	151	151	151
76	Binjai	37	37	37	37	37
77	Padang Sidempuan	79	79	79	79	79
78	Gunungsitoli	101	101	101	101	101
Sumatera Utara		6 113	6 136	6 132	6 132	6 132

Catatan : ¹ Termasuk kelurahan dan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)

Sumber: Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 5 Februari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2019

Humbang Hasundutan adalah sebuah kabupaten di Sumatra Utara, Indonesia. Dibentuk pada 28 Juli 2003, kabupaten ini mempunyai luas sebesar 2.335,33 km² dan beribu kotakan Dolok Sanggul. Kondisi fisik kabupaten ini berada pada ketinggian 330-2.075 meter dpl. Terdiri dari 10 Kecamatan, 153 Desa dan 1 Kelurahan.

Kabupaten Humbang Hasundutan terletak pada garis 2°1'-2°28' Lintang Utara dan 98°10'-98°58' Bujur Timur dan berada di bagian tengah wilayah Propinsi Sumatera Utara.

Letak Geografis Kabupaten Humbang Hasundutan berbatasan dengan :

1. Sebelah Timur dengan Kabupaten Tapanuli Utara
2. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah
3. Sebelah Barat dengan Kabupaten Pakpak Barat
4. Sebelah Utara dengan Kabupaten Samosir

Tabel 1.2
Jumlah Desa di Kabupaten Humbang Hasundutan

No	Kecamatan	Jumlah Desa
1	Pakkat	22
2	Onan Ganjang	12
3	Sijamapolang	10
4	Doloksanggul	27 + 1 kelurahan
5	Lintongnihuta	22
6	Parangian	11
7	Baktiraja	7
8	Pollung	13
9	Parlilitan	20
10	Tarabintang	9
Total 153 Desa + 1 Kelurahan		

Sumber :Surat Edaran Bupati Humbang Hasundutan Nomor : 130/1647/Pem/XI/2007, 12 November 2007

Desa sendiri sangat penting untuk kemajuan pembangunan bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini dikarenakan keberadaan desa yang sudah ada sebelum Negara Indonesia itu berdiri , sebagai wilayah yang memiliki posisi penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia maka wilayah-wilayah di desa perlu diberdayakan dan juga perlu dilindungi agar menjadi lebih kuat, maju, dan mandiri sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pembangunan desa dan pembangunan menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan juga sejahtera. Mengingat sangat pentingnya wilayah desa dalam struktur pemerintahan nasional maka berbagai peraturan perundang-undangan dibuat oleh pemerintah desa oleh sebab itu untuk mengatasi segala bentuk permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan desa maka pemerintah pada tahun 2014 mengeluarkan kebijakan perundang-undangan baru yaitu Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Akan tetapi sebelum adanya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Banyak perubahan aturan namun belum dapat mewisudahi semuanya sebagaimana banyak perubahan dalam sejarah pengaturan desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah,
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah,
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah,
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia,
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah,
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa,
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Namun lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, menjelaskan bahwa desa dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan terendah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dalam hal peningkatan kesejahteraan, pemerintah melakukan upaya dengan membuat suatu kebijakan yang mengarah pada pemberdayaan.

Berdasarkan Undang - Undang tersebut dapat diketahui bahwasanya pemerintah desa merupakan sistem pemerintahan terendah dan mempunyai andil dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa juga merupakan elemen pemerintahan yang menunjang pembangunan Nasional dan juga kemajuan Negara Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan - tujuan tersebut tentunya perlu adanya peningkatan kemampuan penyelenggaraan desa atau pemerintahan desa dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintahan, disamping memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaannya serta aspek-aspek lainnya.

Dengan lahirnya Undang-Undang tentang Desa memberikan kesempatan untuk bisa memperlihatkan jati diri sesungguhnya dalam mengatur dan mengelola desa bersama-sama dengan masyarakat. Selain itu desa memiliki kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan kondisi sosial dan adat istiadat setempat serta desa tidak lagi dianggap pelaksana yang hanya menjalankan kebijakan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah di atasnya. Pembangunan yang dimulai dari grassroots (akar rumput) merupakan

pemikiran bahwa pembangunan harus dimulai dari desa sebagai penopang pembangunan di tingkat daerah maupun nasional walaupun demikian untuk dapat mewujudkannya perlu dilakukan kajian dan langkah yang mendalam.

Adanya wewenang tersebut maka pemerintah desa melakukan suatu pengelolaan terhadap desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan tersebut. Adapun pengelolaan desa bisa berupa, pemberdayaan masyarakatnya dan juga pembangunan desa dengan menggali potensi sumber daya alam sebagai kearifan lokal yang ada dalam suatu daerah. Pembangunan desa bertujuan sebagai sarana meningkatkan kaulaitas hidup dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, dengan melakukan pemberdayaan masyarakat.

Dalam hal ini, pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga pranata-pranatanya. Keterlibatan partisipasi dari masyarakat memungkinkan pemberdayaan menjadi suatu proses yang menciptakan iklim kondusif dalam mengembangkan potensi masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Desa kepada masyarakat untuk memberi pelayanan ataupun bantuan, dalam konteks ini masyarakat sebagai aktor utama pembangunan, sedangkan Pemerintah Desa berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang kegiatan-kegiatan dari masyarakat tersebut.

Dalam hal ini kepala desa memegang peranan penting sebagai pemimpin desa yang mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, serta peningkatan motivasi kepada masyarakat agar mampu menggali potensi dirinya dan berani bertindak memperbaiki kualitas hidupnya, sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Desa Matiti I merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatra Utara, dan mayoritas pekerjaan masyarakat di Desa Matiti I dengan mata pencaharian sebagian besar bergerak pada bidang pertanian, oleh karena itu, guna meningkatkan kondisi kehidupan, kemandirian dan menggali potensi yang ada dalam diri masyarakat di Desa Matiti I sangat diperlukan program-program pemberdayaan. Program-program ini harus mampu membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat di Desa Matiti I, selain itu program yang dilakukan harus melibatkan masyarakat sebagai aktor utama. Akan tetapi program pemberdayaan masyarakat di Desa Matiti I belum memiliki hasil yang memuaskan bagi masyarakat, Pemberdayaan masyarakat di Desa Matiti I masih kurang karena kinerja kepala desa kurang memperhatikan masyarakat yang kurang mampu dan juga kepala desa masih kurang dalam menjangkau masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Dilihat dari kepemimpinan kepala desa masih kurangnya kinerja dan kemampuan dari kepala desa untuk melakukan pendekatan terhadap kelompok-kelompok pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik meneliti lebih jauh mengenai bagaimana program pemberdayaan masyarakat di Desa Matiti I Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengambil judul **“ANALISIS KINERJA KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA MATITI I KECAMATAN DOLOKSANGGUL KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi pada latar belakang, penulis mencoba mengerucutkan persoalan agar lebih memudahkan obyek penelitian dan menghindari luasnya pembahasan yang dilakukan. Berkenaan dengan itu penulis berupaya membatasi masalah yang diteliti, maka pokok yang dibahas sebagai rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja Kepala Desa dalam Pelaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Matiti I Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan?
2. Apa kendala yang di hadapi Kepala Desa dalam melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Matit I Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin di dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja Kepala Desa dalam melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Matiti I Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi Kepala Desa dalam Pelaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Matit I Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Akademis

Penelitian ini di harapkan mampu menajadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai Kinerja Program pemberdayaan Masyarakat di Desa Matiti I Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan

2. Secara Teoritis

Untuk memperkaya dan menambah pengetahuan penulis tentang kinerja pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat desa, sehingga dengan penelitian ini penulis sedapat mungkin berguna dan sebagai tambahan wacana dan sebagai salah satu masukan bagi yang berminat untuk meneliti lebih jauh tentang kinerja pernagkat desa dalam pemberdayaan masyarakat

3. Manfaat Praktis

Sebagai sumber informasi atau bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait secara langsung guna penetapan konsep selanjutnya, khususnya dalam kinerja pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat desa, dan diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan masukan untuk individu, lembaga atau pemegang jabatan. Selain itu, dapat dipakai sebagai informasi dan referensi bagi pihak- pihak yang terkait

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemerintah Desa

2.1.1 Pengertian Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asalusul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No.32 Tahun 2004). Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupannya.

Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain. Desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai permukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten atau Kota.

4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, Desa berhak :

1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;
3. Mendapatkan sumber pendapatan;

Desa berkewajiban :

1. Melindungi dan menjaga persatuan, keutuhan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan
5. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

2.1.2 Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa dalam pembagian wilayah administratif Indonesia, berada di bawah kecamatan, desa yang di

pimpin oleh seorang kepala desa. Desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Pemerintah Desa menurut Undang-Undang nomor 5 tahun 1979 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Desa adalah “kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan. Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 pengaturannya berdasarkan pemikiran keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu penyelenggaraan Pemerintah Desa merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Pemerintah Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam kerangka otonomi desa itu sendiri. Kompleksitas pedesaan sesungguhnya nyaris sama dengan persoalan dalam sebuah negara. Desa merupakan bagian dari institusi yang otonom dengan didalamnya terdapat berbagai tradisi, adat istiadat dan hukum dari masyarakat yang ada dan bersifat relatif mandiri. Dikatakan institusi yang otonom diatas diartikan sebagai institusi yang berhak mengatur atau memerintah dirinya sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat yang ada didalamnya.

2.1.3 Kepala Desa

Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa berwarga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihan diatur oleh peraturan daerah yang berpedoman

pada peraturan pemerintah. Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat dapat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan di akui keberandaannya berlaku ketentuan, hukum adat setempat yang di tetapkan dalam peraturan daerah dengan pedoman pada peraturan pemerintah.

Dalam struktur pemerintah di Indonesia, desa merupakan bentuk wilayah pemerintahan yang terendah. Berdasarkan kajian sejarah, desa adalah daerah otonom yang paling tua, didirikan sebelum lahirnya daerah koordinasi yang lebih besardan sebelum lahirnya negara-negara kerajaan oleh karena itu mempunyai hak dan otonom penuh.

Bersarakan uraian diatas kepala desa adalah pemimpin desa yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemriantah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, kepala desa sebagai pemimpin desa mengacu pendapat Soemarno dan Dardjosumardjono dalam Jurnal Multilateral, (2017.66-77) menyatakan bahwa, Kepala desa merupakan orang pertama yang mengemban tugas dan kewajiban yang berat, yaitu menyelenggarakan dan penanggung jawab yang utama di bidang pemerintahanan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam urusan pemerintah desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan, ketreentruman dan ketertiban sesuai perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong-royong sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan desa.

Dari penjelasan tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa kepala desa mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat berat dalam mengemban tugas dan kewajiban dalam menyelenggarakan pemeritahan dan pembanguan yang ada di desa, disamping tu kepala desa di harapkan mampu memberikan pengarahan bagi masyarakat desanya.

2.1.4 Tugas dan Fungsi Kepala Desa

Berdasarkan Undang-Undang Desa, Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan desa memiliki beberapa tugas yang harus di laksanakan. Dalam pasal 26 Ayat 1 (satu) UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa di sebut tugas Kepala Desa sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pemerintah Desa
2. Melaksanakan Pembangunan Desa
3. Pemebinaan Kemasyarakatan Desa
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Berdasarkan tanggung jawab dan fungsi pemerintahan, berarti pemerintah tingkat desa yang merupakan bagian dari pemerintahan nasional, walaupun lebih sempit cakupannya, juga menjalankan fungsi-fungsi tersebut pada waktu yang bersamaan. Unit pemerintah desa sebagai unit pemerintahan tingkat terendah memiliki tiga fungsi utama, yaitu:

1. Pelayanan kepada masyarakat
2. Fungsi manajemen operasi atau pengembangan
3. Fungsi manajemen atau registrasi

Fungsi administrasi seluruh desa dan pemerintah desa tidak dapat dilaksanakan secara normal jika tidak ada dukungan kelembangaan untuk melaksanakan tanggung jawab masing-masing lembaga semaksimal mungkin. Menyadari pentingnya akan tugas administrasi pemerintah desa, kepala desa dan kader harus berupaya mengembangkan keterampilan dan kemampuannya dalam melaksanakan tugas di bidang pemerintah, pembangunan, dan sosial.

2.2 Kinerja

2.2.1 Pengertian Kinerja

Kinerja adalah merupakan implementasi dari rencana yang telah disusun tersebut. Implementasi kinerja dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan kompetensi, motivasi dan kepentingan. Kinerja organisasi juga ditunjukkan oleh bagaimana proses berlangsungnya kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut. Di dalam proses pelaksanaan aktivitas harus selalu dilakukan monitoring, penilaian dan review atau peninjauan ulang terhadap kinerja sumber daya manusia (Wibowo, 2008:4).

Menurut Mangkunegara (2007:67) istilah kinerja berasal dari kata *job Performance* atau *actual Performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Rivai dan Sagala (2009:548-549) mengatakan kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang sepatutnya memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Kinerja merupakan perilaku nyata ditampilkannya setiap orang, sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh pegawai sesuai dengan perannya dalam perusahaan. Kinerja pegawai merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya perusahaan untuk mencapai tujuannya.

Wilson Bangun (2012:229) menyatakan bahwa Kinerja merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya. Pengertian ini mengandung makna bahwa kinerja merupakan suatu gabungan antara kemampuan, usaha dan kesempatan seseorang yang dapat dilihat atau diketahui dari hasil kerjanya. Usaha itu merupakan

perilaku seseorang dalam rangka mencapai tujuan. Seseorang yang memiliki perilaku yang baik pasti akan berusaha dengan sekuat tenaga melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.

Mulyasa (2007:136) mengemukakan bahwa kinerja atau performance dapat diartikan sebagai prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, hasil kerja atau unjuk kerja. Kinerja di sini lebih dispesifikan kepada pelaksanaan kerja yang identik dengan perilaku seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Artinya kinerja seseorang baru bisa dikatakan baik apabila seseorang tersebut telah berperilaku baik dalam bekerja. Pelaksanaan kinerja seseorang harus dibarengi dengan sebuah perencanaan untuk menciptakan kinerja yang baik, perencanaan kinerja menyatukan target kinerja individual, tim, dan organisasional, sebagaimana menciptakan keterkaitan target dalam melaksanakan pekerjaan. (Sedarmayanti, 2011:176)

Berdasarkan defenisi dan beberapa pendapat ahli di atas, maka dapat di ambil kesimpulan bahwasanya kinerja adalah perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya, yang dapat dilihat dari:

- a. kualitas kerja
- b. ketepatan waktu
- c. inisiatif
- d. kemampuan
- e. komunikasi.

2.2.2 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Suatu organisasi mempunyai tujuan yakni memperoleh keuntungan. Organisasi dapat beroperasi karena kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh para aparatur yang ada didalam organisasi.

Menurut Robbins (2006: 121) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah sebagai berikut:

a. Iklim organisasi

Iklim kerja dalam suatu organisasi sangatlah penting bagi pemimpin untuk memahami kondisi organisasi, karena ia harus menyalurkan bawahan sehingga mereka dapat mencapai tujuan pribadi dan tujuan organisasi. Dengan adanya iklim kerja yang kondusif, maka hal itu akan mempengaruhi kinerja pegawai.

b. Kepemimpinan

Penerapan pemimpin harus mampu dan dapat memainkan peranannya dalam suatu organisasi, pemimpin harus mampu menggali potensipotensi yang ada pada dirinya dan memamfaatkannya didalam unit organisasi

c. Kualitas kerja

Pekerjaan yang dilakukan dengan kualitas yang tinggi dapat memuaskan yang bersangkutan atau organisasi.

d. Kemampuan kerja

Kemampuan untuk mengatur pekerjaan yang menjadi tanggung jawab termasuk membuat jadwal kerja, umumnya mempengaruhi kinerja pegawai

e. Inisiatif

Inisiatif merupakan factor penting dalam usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai. Untuk memiliki inisiatif dibutuhkan pengaturan serta keterampilan yang dimiliki oleh para pegawai dalam usaha untuk meningkatkan hasil yang dicapainya.

f. Motifasi

Motivasi ini merupakan subyek yang penting bagi pemimpin, karena menurut definisi pemimpin harus bekerja dengan dan melalui orang lain. Pemimpin perlu memahami orang-orang berperilaku tertentu agar dapat mempengaruhinya.

g. Daya tahan/kehandalan

Apakah pegawai mampu membuat perencanaan dan jadwal pekerjaannya

h. Kuantitas pekerjaan pekerjaan yang dilakukan karyawan harus memiliki kuantitas kerja tinggi dapat memuaskan yang bersangkutan dan perusahaan

i. Displin Kerja

Dalam memperhatikan peran manusia dalam organisasi agar dapat mencapai tujuan yang ditentukan diperlukan adanya kedisiplinan yang tinggi sehingga dapat mencapai suatu hasil kerja yang optimal.

2.2.3 Indikator Kinerja

Unsur – unsur yang dinilai dari kinerja adalah Kualitas kerja, Kuantitas kerja, Keandalan, dan Sikap. Adapun penjelasan dari unsur – unsur tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kualitas kerja, mencerminkan mutu standart yang telah ditentukan sebelumnya biasanya disertai dengan peningkatan kemampuan, ketetapan, ketelitian, keterampilan, dan kebersihan.
2. Kuantitas kerja, mencerminkan peningkatan volume atau jumlah dari kegiatan yang menghasilkan penyelesaian kerja dengan extra. Kuantitas kerja dapat di ukur dengan melalui penambahan atas nilai fisik dari hasil kerja sebelumnya.
3. Keandalan, terdiri dari mengikuti instruktur, inisiatif, kehati – hatian dan kerajinan.

4. Sikap kerja, terdiri dari sikap terhadap perusahaan, karyawan lain, pekerjaan, dan serta kerjasama. (Mangkunegara, 2011, hal. 75).

Maka dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang di pergunakan untuk mengukur output atau outcome suatu kegiatan.

2.3 Pemberdayaan Masyarakat

2.3.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Menurut Edi Suharto (2017:57) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator sebuah keberhasilan pemberdayaan. Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif (kelompok).

Pemberdayaan masyarakat menurut Widjaja (2003:169) adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi (Widjaja, 2003:169).

Berdasarkan beberapa pengertian pemberdayaan yang dikemukakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan, atau kemampuan kepada individu masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahnya dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara mandiri.

2.3.2 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan, kesenjangan, tidak berdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi atau layak. Kemiskinan dapat di lihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi / layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan dan transportasi. Keterbelakangan misalnya produktifitas yang rendah, sumber daya manusia yang lemah, terbatasnya akses pada tanah ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat,

melemahnya pasar-pasar lokal/tradisional karena di pergunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional. Dengan perkataan lain masalah keterbelakangan menyangkut struktural (kebijakan) dan kultural. Tujuan yang ingin di capai dari pemberdayaan masyarakat adalah membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri.

Kemandirian tersebut meliputi, kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang di alami oleh masyarakat yang di tandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang di pandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang di hadapi dengan mempergunakan daya atau kemampuan yang dimiliki. Daya kemampuan yang di maksud adalah kemampuan kognitif, konatif psikomotorik, dan efektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik atau bersifat material. Pelaku pemberdayaan harus dapat berperan sebagai motivator, mediator, dan fasilitator yang baik.

Pelaku pemberdayaan tidak hanya dituntut untuk memperdaya pengetahuannya, melainkan mereka dituntut meningkatkan keterampilannya dalam mendesain pemberdayaan. Terkait dengan tujuan pemberdayaan, Menurut Sulistiyani menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang di alami oleh masyarakat yang di tandai dengan kemampuan memikirkan, menentukan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang di hadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki.

Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/material. Kondisi kognitif pada

hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang di hadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbetuk dan di arahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pemberdayaan masyarakat. Kondisi afektif adalah merupakan perasaan yang dimiliki oleh individu yang di harapkan dapat di intervensi untuk mencapai pemberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang di miliki masyarakat sebagai upaya mendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.

2.3.3 Proses Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Suharto (2017:57) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif (kelompok). Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasi atau hubungan antara lapisan sosial yang dicirikan dengan adanya polarisasi ekonomi, maka kemampuan individu “senasib” untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk

pemberdayaan yang paling efektif. Hal tersebut dapat dicapai melalui proses dialog dan diskusi di dalam kelompoknya masing-masing, yaitu individu dalam kelompok belajar untuk mendeskripsikan suatu situasi, mengekspresikan opini dan emosi mereka atau dengan kata lain mereka belajar untuk mendefinisikan masalah, menganalisis, kemudian mencari solusinya.

Bahwa proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui tiga proses yaitu :

- a) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Titik tolaknya adalah bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada sumber daya manusia atau masyarakat tanpa daya. Dalam konteks ini, pemberdayaan adalah membangun daya, kekuatan atau kemampuan, dengan mendorong (encourage) dan membangkitkan kesadaran (awareness) akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkannya.
- b) Memperkuat potensi daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering), sehingga diperlukan langkah yang lebih positif, selain dari iklim atau suasana.
- c) Memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaannya dalam menghadapi yang kuat.

Proses pemberdayaan warga masyarakat diharapkan dapat menjadikan masyarakat menjadi lebih berdaya berkekuatan dan berkemampuan.

2.3.4 Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sumodiningrat (2000:45), pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan suatu proses yang membutuhkan waktu atau masa. Sementara menurut Edy M, Sungkowo (2017 : 44-

45), proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap.

Tahap – tahap yang harus dilalui tersebut meliputi:

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri yang merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Dengan menekankan pada proses, maka pemberdayaan masyarakat memiliki tahap-tahap sebagai berikut:

- a) Penyadaran Pada tahap ini, dilakukan sosialisasi terhadap komunitas agar mereka mengerti bahwa kegiatan pemberdayaan ini penting bagi peningkatan kualitas hidup mereka, dan dilakukan secara mandiri (self help)
- b) Pengkapasitasan Sebelum diberdayakan, komunitas perlu diberikan kecakapan dalam mengelolanya. Tahap ini sering disebut sebagai capacity bulding, yang terdiri atas pengkapasitasan, organisasi, dan system nilai.
- c) Pendayaan Pada tahap ini, target diberikan daya, kekuasaan, dan peluang sesuai dengan kecakapan yang sudah diperolehnya.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan tahapan pemberdayaan masyarakat melalui penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan, sehingga masyarakat mampu mandiri dalam meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan peneliti yang telah ada sebelumnya. Perbandingan yang dapat di jadikan peneliti sebagai inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang terkait dengan judul yang penulis kaji :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Reni Apriyani, Lukmanul Hakim, Evi Priyanti (2022)	Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Tegalsawah Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawan	Peran Kepala Desa Tegalsawah sebagai motivator sudah cukup baik. Hal ini dilihat dalam rapat mingguan bahwa dorongan-dorongan yang diberikan Kepala Desa Tegalsawah mampu mempengaruhi masyarakat untuk memiliki kesadaran terhadap pentingnya kerja sama dalam program

			<p>pemberdayaan desa sehingga hal ini mendapatkan respon positif dari masyarakat Desa Tegal Sawah karena dorongan dan bimbingan dari Kepala Desa Tegalsawah sangat dibutuhkan dan dinantikan oleh masyarakat desa.</p>
2	<p>Immanuel N. Tadanugi (2018)</p>	<p>Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Tamonjengi Kecamatan Mori Kabupaten Morowali Utara</p>	<p>Peranan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pembangunan Desa Tamonjengi, dapat terlaksana atau selalu dilakukan oleh kepala desa dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan dan saran kritikan terhadap pelaksanaan pembangunan di desa hal ini dapat di lihat dari hasil wawancara dan tabel yang sudah di uraikan dalam pembahasan. Peranan kepala desa dalam melakukan pembinaan masyarakat Desa Tamonjengi juga dapat terlaksana dengan baik melalui peningkatan ketrampilan dan sumber daya masyarakat desa dengan dilakukannya pelatihan atau seminar – seminar tentang pemanfaatan kekayaan alam dan ketrampilan mayarakat desa, hal ini dapat di buktikan dengan hasil wawancara dan tabel yang sudah tecantum di pembahasan</p>
3	<p>Hasdinawati1, Syamsuddin2, Supratman Tahir (2021) Jurnal</p>	<p>Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai</p>	<p>Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakatdi Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai sudah terlaksana dengan cara mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan</p>

			<p>pembangunan Desa, Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa serta melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan. Dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa diwujudkan dengan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam rapat musyawarah perencanaan pembangunan serta 80 ikipe pencerahan kepada masyarakat akan pentingnya pembangunan desa.</p>
4	<p>Endang Hermawan, Dini Pebriyani, Dwi Nurita Julianty, Fitri Safitri & Galih Tri Laksono (2021)</p>	<p><i>Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tirtawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat</i></p>	<p>Pemerintahan Desa Tirtawangunan sudah mengoptimalkan program pemberdayaan dengan maksimal dengan memberikan anggaran untuk pemberdayaan, dikarenakan masa pandemi ini jadi adanya sedikit ada hambatan dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan. Walaupun dalam kenyataannya anggaran telah disusutkan untuk proses pemberdayaan ini tetapi pemerintah desa mengusahakan agar tidak terlalu mempengaruhi dalam pemberdayaan kepada masyarakat ini. Pemerintahan desa mempunyai kerja sama yang baik dengan pihak swasta maupun masyarakat, sehingga ketiganya dapat memanfaatkan antara satu dengan yang lainnya.</p>
5	<p>Muhammad Viki Nisfani Al Azis (2022)</p>	<p><i>Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan</i></p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik</p>

		<p><i>Masyarakat Petani di Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi</i></p>	<p>kesimpulan bahwa Pemerintah Desa Kertamukti telah berupaya dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat petani melalui pelatihan-pelatihan, menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana yang mendukung kebutuhan masyarakat petani. Menurut penulis peran Pemerintah Desa Kertamukti cukup baik walaupun kurang maksimal. Pada peran pemerintah desa sebagai regulator sudah merujuk kepada UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Peran desa sebagai dinamisator cukup optimal karena pemerintah desa memberikan pembinaan kepada masyarakat tani melalui dinas pertanian dan pemerintah desa akan merencanakan program ketahanan pangan untuk menyediakan bibit tanaman, peternakan, pertanian, dan sebagian bantuan modal. Namun, pemerintah desa kurang memenuhi peran sebagai fasilitator</p>
--	--	--	--

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas terdapat persamaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya :

- a. Persamaan dengan Reni Apriyani, Lukmanul Hakim, Evi Priyanti yaitu sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan sama borfokus pada pemberdayaan masyarakat desa yang ingin menciptakan masyarakat mandiri dan pentingnya kerja sama untuk mengembangkan potensi dalam diri masyarakat.

- b. Persamaan dengan Imanuel N. Tadanugi yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pembangunan Desa, dan melakukan pembinaan terhadap masyarakat desa agar pembangunan desa dapat berjalan dengan baik dan masyarakat desa juga lebih maju dan mumpuni.
- c. Persamaan dengan Hasdinawati¹, Syamsuddin², Supratman Tahir yaitu mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa, Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa serta melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan.
- d. Persamaa dengan penelitian terdahulu yang ke 4 dan yang ke 5 yaitu tentunya sama sama berfokus pada program pemberdayaan masyarakat desa dan sama sama untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dan untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas terdapat perbedaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya :

- a. penelitian terdahulu yaitu dimana tidak jauh berbeda dengan penelitian sekarang karena sama sama meneliti tentang program pemberdayaan masyarakat desa.
- b. penelitian terdahulu lebih bertefokus kepada peranan kepala desa maupun peran pemerintah desa.
- c. sedangkan penelitian yang di tulis sekarang ini adalah berfokus pada kinerja kepala desa dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa.

2.5 Kerangka Berpikir

Menurut Eecho (2005), kerangka berpikir adalah suatu dasar pemahaman yang akan memengaruhi dasar dari pemahaman orang lain. Oleh karena itu, kerangka berpikir dapat

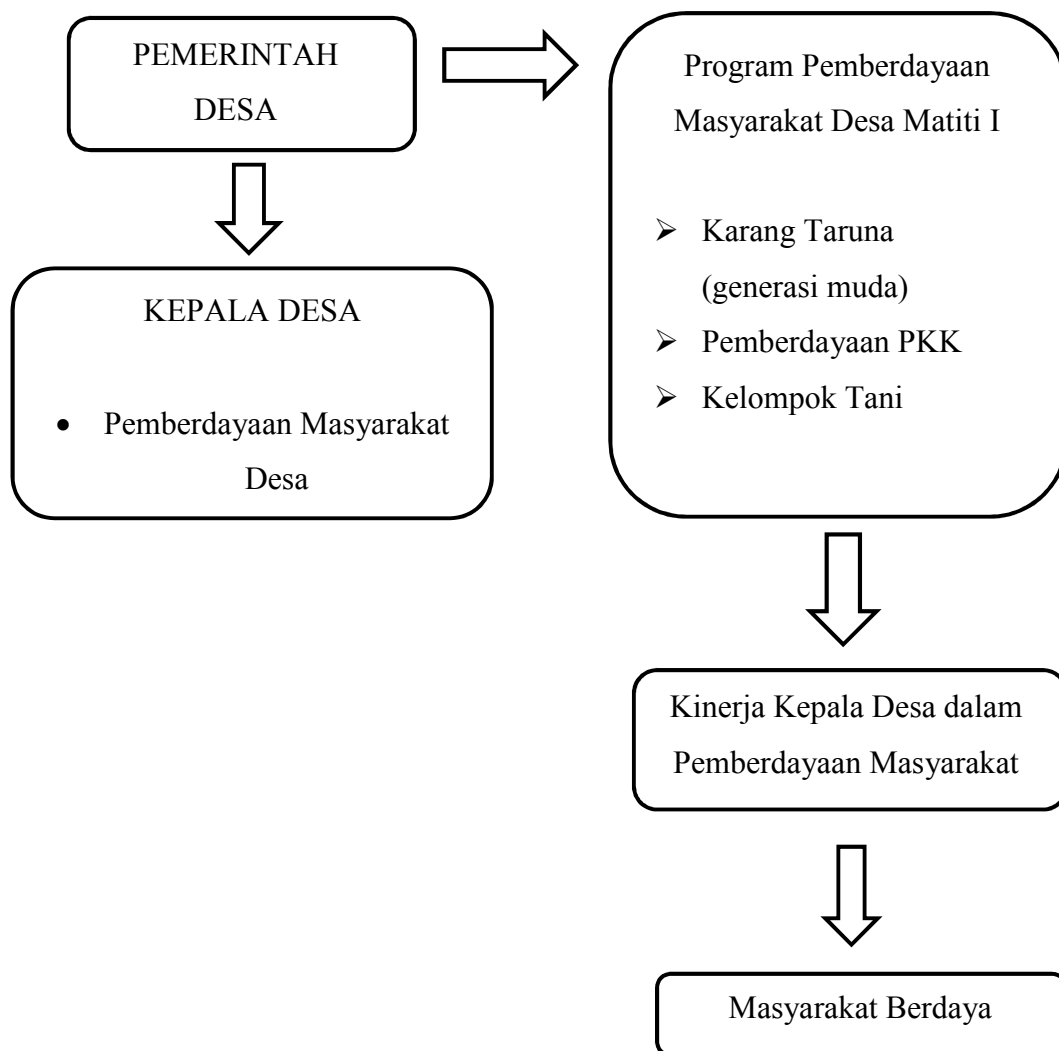
dijadikan sebagai dasar pemikiran yang akan dituangkan ke dalam bentuk penelitian atau dalam bentuk karya tulis. Kerangka berpikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala dan fakta yang menjadi permasalahan pada obyek penelitian, disebutkan bahwa kriteria utama agar suatu kerangka pemikiran bisa meyakinkan sesama ilmuwan adalah alur pikiran yang logis dalam membangun suatu kerangka berpikir dan menghasilkan kesimpulan/sintesa yang berujung pada anggapan dasar.

Untuk mencapai tujuan pemerintah desa dalam hal pemberdayaan masyarakat maka diperlukan kerja sama antara pemimpin dan masyarakat yang dalam hal ini diharapkan peran aktif dari masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Karena dalam proses pemberdayaan masyarakat, masyarakat desa ditempatkan dalam posisi ganda yakni sebagai subyek dan obyek pemberdayaan masyarakat.

Sebagai subyek pemberdayaan masyarakat, masyarakat desa memiliki tanggung jawab untuk memberikan partisipasi dan kontribusinya dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Sedangkan sebagai obyek program pemberdayaan, masyarakat desa memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dari hasil dan kemajuan yang dicapai dari proses pemberdayaan masyarakat.

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat tersebut sangat di perlukan kerja sama antar pemimpin dan yang di pimpin, dimana pemerintah desa menjalankan program pemberdayaan masyarakat yang berfokus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka pemerintah desa menjalankan program pemberdayaan masyarakat dimana program tersebut ada penyuluhan, pembinaan dan koordinasi oleh karena itu dampaknya yaitu masyarakat desa menjadi berdaya atau kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu :



Gambar 2.1

Kerangka Berpikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Creswell (2016) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial, dan lain-lain. Salah satu alasan mengapa menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman peneliti dimana metode ini dapat menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan suatu yang sulit untuk dipahami.

Dalam penelitian ini metode kualitatif membantu dalam menggali informasi yang lebih dalam terkait dengan analisis kinerja kepala desa dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat, karena metode kualitatif ini merupakan metode yang fokus pada pengamatan mendalam sehingga pengguna metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Tipe penelitian ini dianggap sangat efektif untuk dipakai karena menggambarkan keadaan obyek yang ada pada masa sekarang secara kualitatif berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yang akan dilaksanakan penulis bertempat di Desa Matiti I Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan dan waktu penelitian akan di lakukan pada bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023

3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah salah satu objek yang dimintai bantuan untuk menanggapi pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan informan adalah yang dianggap mempunyai informasi yang dibutuhkan di wilayah penelitian. Selain itu informan penelitian merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti.

Menurut peneliti, informan dalam penelitian ini adalah :

a. Informan Kunci

Merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Matiti I Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan

b. Informan Utama

Merupakan yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang di teliti. Adapun informan utama dalam penelitian ini adalah Ketua Karang Taruna, Ketua PKK, Ketua Kelompok Tani

c. Informan Tambahan

Merupakan pendukung, biasanya dibutuhkan dalam proses penelitian untuk tambahan data yang diperlukan. Informan tambahan ini adalah masyarakat Desa Matiti I

Tabel 3.1

Informan Penelitian

No	Informan Penelitian	Jumlah
1	Kepala Desa Matiti I	1 orang
2	Ketua Karang Taruna Desa Matiti I	1 orang
3	Ketua Kelompok PKK Desa Matiti I	1 orang
4	Ketua Kelompok Tani Desa Matiti I	1 orang
5	Masyarakat Desa Matiti I	3 orang
Total		7 orang

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk bisa mengumpulkan data yang terkait dengan permasalahan dari penelitian yang diambilnya. Pengumpulan data meliputi beberapa teknik yaitu :

1. Wawancara

Wawancara atau yang biasa yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden untuk memastikan kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Sehingga dengan hal inilah akan kemudian mendapatkan penjelasan langsung yang sifatnya lebih akurat. Dalam kegiatan wawancara, tekniknya adalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada informan berdasarkan maksud atau tujuan penelitian. Teknik ini akan dilakukan dengan mencatat berdasarkan pedoman wawancara yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian teknik ini pula dilakukann dengan beberapa kali hingga mendapatkan data yang dianggap jelas dan sesuai dengan yang diharapkan.

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen bisa berbentuk tulisan

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar gidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Dokumentasi yang akan dilakukan adalah dengan mengumpulkan beberapa berkas yang dapat menguatkan hasil penelitian.

3.5 Teknik Analisi Data

Dalam pendekatan kualitatif analisis data dilakukan sejak awal penelitian, proses analisis data secara keseluruhan melibatkan usaha untuk memaknai data yang berupa teks atau gambar, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berupa pertanyaan yang tidak berupa angka yang kemudian disusun secara naratif dengan pola atau susunan tertentu.

Menurut Creswell (2016:264) langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut :

1. Mengelolah dan mempersiapkan data untuk di analisis, langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, men-scening materi, mengetik data lapangan atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
2. Membaca keseluruhan data, langkah pertama adalah membangun general sense atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.
3. Menganalisis lebih data dengan men-coding merupakan proses mengelola materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya, langkah ini

melibatkan beberapa tahap mengambil data tulisan atau gambar yang telah di kumpulkan selama proses pengumpulan mensegmentasi kalimat-kalimat atau paragraf.

4. Menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting (ranah), orang (partisipan), kategori-kategori, dan tema-tema yang akan di analisis, deskripsi ini melibatkan usaha penyapaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi atau peristiwa-peristiwa dalam setting (ranah) tertentu.
5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif, pendekatan yang paling populer adalah dengan menerapkan pendekatan anaratig dalam menyampaikan hasil analisis.
6. Langkah terakhir dalam analisis data adalah menginterpretasi atau memakanai data, mengajukan pertanyaan seperti pelajaran yang dapat di ambil dari semua ini akan membantu peneliti mengungkap esensi dari suatu gagasan.

